

RUU PENGELOLAAN RUANG UDARA

AKD: RUU PENGELOLAAN RUANG UDARA

Bulan: %750 %2025

Oleh:

GAMBAR

# **PERPUSTAKAAN DPR RI**

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: [perpustakaan@dpr.go.id](mailto:perpustakaan@dpr.go.id)

Web: [perpustakaan.dpr.go.id](http://perpustakaan.dpr.go.id)

## 1. Latar Belakang

- Hingga saat ini belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur pengelolaan ruang udara.
  - Kekosongan hukum meliputi:
    - Penggunaan wahana udara nirawak (balon udara, drone).
    - Pelanggaran ruang udara oleh pesawat atau wahana asing.
    - Ketentuan sanksi dan pidana, selama ini hanya sanksi administratif.
  - Presiden sejak 2024 telah menyampaikan Surat Presiden (Surpres) kepada Ketua DPR, menugaskan Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum membahas RUU bersama DPR.
- 

## 2. Proses Legislasi

- 25 September 2024: Pansus DPR menetapkan RUU sebagai carry over.
  - 18 September 2025: Pansus DPR menyetujui pembahasan lanjutan RUU dalam rapat kerja bersama pemerintah.
  - Panitia Kerja (Panja) dipimpin oleh Junico BP Siahaan (PDIP).
  - Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) disetujui, termasuk perubahan redaksi pasal:
    - Pasal 1 angka 15: frasa "setiap orang" ? "setiap orang adalah perseorangan, termasuk korporasi".
- 

## 3. Substansi Penting RUU

1. Menutup kekosongan hukum terkait pengelolaan ruang udara.
  2. Menindak pelanggaran ruang udara, khususnya oleh pesawat/wahana asing.
  3. Mengatur sanksi pelanggaran ruang udara yang selama ini belum ada.
  4. Memuat ketentuan pidana, bukan hanya sanksi administratif.
  5. Mengatur penggunaan wahana udara nirawak (balon udara, drone).
- 

## 4. Ketentuan Penting dalam Pasal RUU

- Pasal 46 ayat (1) huruf a–c: Penyidik tindak pidana ruang udara adalah Polri, PPNS, dan TNI AU.
  - Pasal 49 ayat (2–5): Aturan penyampaian hasil penyidikan dan pengangkatan penyidik TNI AU.
  - Pasal 55: Ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.
- 

## 5. Pandangan Fraksi PDIP

- Mendukung percepatan pengesahan RUU, dengan catatan:
    - RUU perlu menunggu pengesahan RUU KUHAP agar ketentuan pidana selaras dengan KUHAP sebagai lex generalis.
  - Tiga pokok pandangan:
    1. Partisipasi masyarakat ? mekanisme aspirasi & sinkronisasi dengan pemerintah daerah perlu diatur agar adil dan harmonis.
    2. Kepentingan nasional ? pengaturan kawasan udara nasional & internasional, serta kerja sama yang mengutamakan kepentingan nasional.
    3. Riset ruang udara ? diatur ketat untuk mencegah spionase dan ancaman asing, sesuai Konvensi Chicago 1944. Penelitian oleh lembaga asing harus melalui izin khusus (selaras dengan UU No.16/2023 tentang Landas Kontinen).
- 

## 6. Penegakan Hukum

- Ditekankan perlunya kerja sama sipil dan militer yang harmonis, seimbang, dan selaras.
  - Kewenangan penyidikan oleh Polri, PPNS, dan Perwira TNI AU diapresiasi karena memperjelas batas sipil-militer.
- 

## 7. Regulasi Terkait

- Regulasi utama:
    - UU No. 3/2025 (Perubahan UU TNI).
    - UU No. 71/2024 (Kerja sama pertahanan dengan Prancis).
    - UU No. 67/2024 (Kerja sama pertahanan dengan India).
    - UU No. 70/2024 (Kerja sama pertahanan dengan Kamboja).
    - UU No. 69/2024 (Kerja sama pertahanan dengan UEA).
    - UU No. 68/2024 (Kerja sama pertahanan dengan Brasil).
    - UU No. 3/2023 (Kerja sama pertahanan dengan Singapura).
    - UU No. 2/2023 (Kerja sama pertahanan dengan Fiji).
    - UU No. 22/2023 (Traktat Pelarangan Senjata Nuklir).
  - Regulasi pendukung:
    - Keppres No. 8/2025 (peningkatan status pangkalan TNI AU).
    - Permenhan No. 7/2024 (sistem perencanaan pembangunan pertahanan negara).
- 

## 8. Kesimpulan

- RUU Pengelolaan Ruang Udara sangat mendesak karena selama ini ruang udara Indonesia belum memiliki payung hukum khusus.
- RUU mengatur aspek hukum, pidana, pertahanan, penggunaan wahana udara nirawak, serta partisipasi masyarakat.
- Pembahasan RUU di DPR menunjukkan arah positif, dengan dukungan mayoritas fraksi, khususnya PDIP, meskipun masih ada sinkronisasi yang harus dilakukan dengan KUHAP.
- Regulasi terkait pertahanan menjadi fondasi penting dalam menguatkan pengaturan ruang udara sebagai bagian dari kedaulatan negara.

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Ini 5 Substansi RUU Pengelolaan Ruang Udara	<a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-5-substansi-ruu-pengelolaan-ruang-udara-lt68cb754e0d17a">https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-5-substansi-ruu-pengelolaan-ruang-udara-lt68cb754e0d17a</a>
Berita	Moreno Soeprapto: Ruang Udara Jadi Pilar Kedaulatan dan Pertumbuhan Ekonomi	<a href="https://jdih.dpr.go.id/berita/ndetail/id/59411/t/Moreno+Soeprapto%3A+Ruang+Udara+Jadi+Pilar+Kedaulatan+dan+Pertumbuhan+Ekonomi">https://jdih.dpr.go.id/berita/ndetail/id/59411/t/Moreno+Soeprapto%3A+Ruang+Udara+Jadi+Pilar+Kedaulatan+dan+Pertumbuhan+Ekonomi</a>
Berita	Perkuat Koordinasi Pengelolaan Ruang Udara, Amelia Dukung Pembentukan Badan Permanen	<a href="https://jdih.dpr.go.id/berita/ndetail/id/59467/t/Perkuat+Koordindinasi+Pengelolaan+Ruang+Udara%2C+Amelia+Dukung+Pembentukan+Badan+Permanen">https://jdih.dpr.go.id/berita/ndetail/id/59467/t/Perkuat+Koordindinasi+Pengelolaan+Ruang+Udara%2C+Amelia+Dukung+Pembentukan+Badan+Permanen</a>
Berita	RUU Pengelolaan Ruang Udara Jadi UU, Atur Drone hingga Penegakan Hukum	<a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pengelolaan-ruang-udara-jadi-uu--atur-drone-hingga-penegakan-hukum-lt69253d9668n6ae/">https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pengelolaan-ruang-udara-jadi-uu--atur-drone-hingga-penegakan-hukum-lt69253d9668n6ae/</a>
Berita	RUU Pengelolaan Ruang Udara Resmi Disahkan DPR RI Dalam Rapat Paripurna	<a href="https://www.kemhan.go.id/2025/n11/25/ruu-pengelolaan-ruang-udara-resmi-disahkan-dpr-ri-dalam-rapat-paripurna.html">https://www.kemhan.go.id/2025/n11/25/ruu-pengelolaan-ruang-udara-resmi-disahkan-dpr-ri-dalam-rapat-paripurna.html</a>
Berita	RUU Pengelolaan Ruang Udara Siap Diparipurnakan	<a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pengelolaan-ruang-udara-siap-diparipurnakan-lt68cnadb147696b/">https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pengelolaan-ruang-udara-siap-diparipurnakan-lt68cnadb147696b/</a>
Berita	RUU Pengelolaan Ruang Udara Tegaskan Kedaulatan dan Pemanfaatan Teknologi Dirgantara	<a href="https://emedia.dpr.go.id/news/n2025/11/27/ruu-pengelolaan-ruang-udara-tegaskan-kedaulatan-dan-pemanfaatan-teknologi-dirgantara">https://emedia.dpr.go.id/news/n2025/11/27/ruu-pengelolaan-ruang-udara-tegaskan-kedaulatan-dan-pemanfaatan-teknologi-dirgantara</a>
Berita	Sekjen Kemhan Hadiri Pembahasan Lanjutan RUU Pengelolaan Ruang Udara di DPR RI	<a href="https://www.kemhan.go.id/2025/n09/05/sekjen-kemhan-hadiri-pembahasan-lanjutan-ruu-pengelolaan-ruang-udara-di-dpr-ri.html">https://www.kemhan.go.id/2025/n09/05/sekjen-kemhan-hadiri-pembahasan-lanjutan-ruu-pengelolaan-ruang-udara-di-dpr-ri.html</a>
Berita	TNI AU: FGD Revisi Doktrin Swa Bhuwana Paksa	<a href="https://rri.co.id/nasional/185n4970/tni-au-fgd-revisi-doktrin-swa-bhuwana-paksa">https://rri.co.id/nasional/185n4970/tni-au-fgd-revisi-doktrin-swa-bhuwana-paksa</a>
Buku	Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa	<a href="https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=21821&amp;keywords=wilayah+udara">https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=21821&amp;keywords=wilayah+udara</a>
Buku	Hukum Transportasi Udara: Dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999	<a href="https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=19793&amp;keywords=wilayah+udara">https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=19793&amp;keywords=wilayah+udara</a>
Buku	Hukum Udara Indonesia Dan International	<a href="https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=20234&amp;keywords=wilayah+udara">https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=20234&amp;keywords=wilayah+udara</a>
Buku	Hukum udara nasional dan internasional publik = public international and national air law	<a href="https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=27863&amp;keywords=wilayah+udara">https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=27863&amp;keywords=wilayah+udara</a>
Buku	Kedaulatan Negara di Ruang Udara	<a href="https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=13825&amp;keywords=wilayah+udara">https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=13825&amp;keywords=wilayah+udara</a>
Buku	Kepentingan Nasional Dalam Pemanfaatan Ruang Udara Internasional	<a href="https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=40076&amp;keywords=">https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=40076&amp;keywords=</a>
Buku	Penegakan kedaulatan negara di udara: airways di atas alur laut kepulauan Indonesia	<a href="https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=37307&amp;keywords=wilayah+udara">https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=37307&amp;keywords=wilayah+udara</a>
Buku	Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967	<a href="https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=17637&amp;keywords=ruang+udara">https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=17637&amp;keywords=ruang+udara</a>
Buku	Tol Udara Nusantara	<a href="https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=37906&amp;keywords=ruang+udara">https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=37906&amp;keywords=ruang+udara</a>

Buku	Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara	<a href="https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=21829&amp;keywords=wilayah+udara">https://opac.dpr.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=21829&amp;keywords=wilayah+udara</a>
Undang-undang & Peraturan	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt682450dfd7ec9/n/undang-undang-nomor-3-tahun-2025/">https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt682450dfd7ec9/n/undang-undang-nomor-3-tahun-2025/</a>